BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa sumber acuan dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian tersebut dijadikan oleh penulis sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini. Tabel 2.1. di bawah ini berisi ringkasan penelitian terdahulu yang penulis gunakan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen & Kontrol	Hasil Penelitian
Kawijaya dan Juniarti (2011)	*Auditor Switch* (Y)	*Qualified audit opinion* (X_1) *Merger* (C_1) Pergantian manajemen (C_2) Ekspansi (C_3)	Tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa *qualified audit opinion* dan ketiga variabel kontrol yang lain merupakan variabel yang memprediksi perpindahan auditor
Hudaib dan Cooke (2013)	*Auditor Switching* (Y)	*Managing director changes* (X_1) Kinerja keuangan (X_2)	Perusahaan yang kinerja keuangannya buruk dan melakukan pergantian manajemen cenderung melakukan pergantian auditor
Nasser *et al.,* (2015)	*Audit Firm Switching* (Y)	Ukuran klien (X_1) *Financial distress* (X_2) Pergantian manajemen (X_3) Opini audit (X_4) *Fee* audit (X_5) Kualitas audit (X_6)	1. Ukuran klien dan kinerja keuangan yang buruk secara signifikan berpengaruh terhadap pergantian KAP. 2. Pergantian manajemen, opini audit, *fee* audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP.
Ismail *et al.,*(2015)	*Auditor Switching* (Y)	*Leverage* (X_1) *Growth turnover* (X_2) *Financing activities* (X_3) *Longevity of audit engagement* (X_4) *Audit fee* (X_5) *Qualified audit opinion* (X_6)	1. *Leverage, growth turnover, financing activities, longevity of audit engagement* dan *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor 2. Opini audit *qualified* tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor

Lin dan Liu (2012)	*Auditor Switching* (Y)	*Largest owner's Shareholding* (X_1) *Number of Supervisory Board* (X_2) *CEO hold BOD position* (X_3)	Perusahaan dengan kepemilikan manajerial tinggi, *supervisory board* yang kecil, dan CEO yang memegang jabatan BOD memilih untuk mengganti auditor yang berkualitas tinggi.
Rakow *et al.*, (2012)	*Auditor Firm Switching Risk* (Y)	*Lending Decisions* (X)	Pergantian KAP dari regional ke regional memiliki resiko terbesar terhadap keputusan melakukan pinjaman, begitu pula sebaliknya.
Divianto (2011)	*Auditor Switching* (Y)	Opini audit (X_1) Ukuran KAP (X_2)	Secara parsial, ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan opini audit berpengaruh positif signifikan. Secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan.
Lopez dan Peters (2011)	*Auditor Switching* (Y)	*Auditor Workload Compression* (X) *Audit risk* (C_1) *Financial risk* (C_2) *Clientele mismatch* (C_3)	1. *Workload compression* berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian auditor. 2. *Clientele mismatch* dan *financial risk* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.
Yanwar Titi Pratitis (2012)	*Auditor Switching* (Y)	Ukuran KAP (X_1) Ukuran Klien (X_2) *Financial distress* (X_3)	Ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor, sedangkan ukuran klien dan *financial distress* tidak berpengaruh.
Pratini dan Astika (2013)	Pergantian Auditor (Y)	Pergantian manajemen (X_1) *Financial distress* (X_2) Opini auditor (X_3) Ukuran KAP (X_4)	Pergantian manajemen dan *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan opini audit dan ukuran KAP tidak mendukung terjadinya pergantian auditor.

Suarjana dan Widhiyani (2015)	Pergantian KAP (Y)	Opini audit (X_1) Pertumbuhan perusahaan (X_2) Reputasi auditor (X_3) Ukuran perusahaan (X_4) Perubahan Rentabilitas (X_5)	Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian KAP, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan informasi dari Tabel 2.1, masih terdapat perbedaan hasil terkait dengan variabel yang peneliti gunakan.

Tabel 2.2. Perbedaan Hasil Penelitian

Variabel	Signifikan	Tidak Signifikan
Opini Audit	Hudaib dan Cooke (2013), Rakow *et al.*, (2012), Divianto (2011), Suarjana dan Widhiyani (2015).	Nasser *et al.*, (2013), Ismail *et al.*, (2015), Pratini dan Astika (2013).
Kinerja Keuangan Perusahaan	Nasser *et al.*, (2013), Ismail *et al.*, (2015), Lopez dan Peters (2011), Pratini dan Astika (2013)	Pratitis, Y.T. (2012), Suarjana dan Widhiyani (2015)
Pergantian Manajemen	Hudaib dan Cooke (2013), Pratini dan Astika (2013)	Kawijaya dan Juniarti (2002), Nasser *et al.*, (2013)

Hasil penelitian sebelumnya berbeda-beda bisa dikarenakan perbedaan perusahaan yang diamati, waktu pelaksanaan penelitian, sampel penelitian, dan periode pengamatannya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Agency Theory*

Perusahaan selalu melakukan kontrak kerja dengan setiap individu yang menjalankan kegiatan perusahaan, termasuk manajemen. Di dalam kontrak kerja diatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat yang akan didapat oleh kedua pihak. Pemilik perusahaan terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan administrasi dan operasi bisnis, sedangkan manajemen dipekerjakan untuk menjalankan hal itu. Karena perbedaan kepentingan dan informasi yang diperoleh, manajemen dapat menghiraukan tanggung jawab dia dan memilih memperkaya pribadinya (*moral*

hazard). Hal ini yang menimbulkan teori keagenan dengan biaya agensi pada akhirnya ditanggung oleh manajemen (Jensen dan Meckling, 2010).

Hubungan agensi adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih *principal* yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 2010). Teori agensi ini telah menjadi dasar dari pemahaman *earnings management* dan *good corporate governance*. *Earnings management* adalah salah satu dampak dari pendelegasian wewenang dari *principal* kepada *agent*. Manajemen cenderung akan memaksimalkan utilitas mereka guna mendapatkan keuntungan yang cepat untuk kepentingan sendiri. *Good corporate governance* adalah suatu teori yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan agensi (konflik kepentingan) antara manajemen dan pemilik perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan membuat hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan menjadi sehat.

2.2.2.*Audit Tenure*

Tenur audit adalah lamanya masa perikatan antara auditor dan KAP dengan kliennya, dengan kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadikan tenur audit sebagai perdebatan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai pergantian auditor, hingga pada Mei 2015 yang lalu, pemerintah mengeluarkan PP No. 20/2015 tentang praktik akuntan publik.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 11 ayat 1, KAP tidak lagi dibatasi oleh waktu untuk memberikan jasa audit kepada suatu perusahaan, sedangkan auditor dapat memberikan jasa audit secara berturut-turut selama lima tahun.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya dari munculnya PP No. 20/2015 adalah, bagaimana pengguna informasi keuangan dapat mempercayai bahwa KAP dapat mempertahankan independensi auditornya. Oleh karena itu, dipilihnya alat lain guna menjaga independensi auditor dalam melakukan jasa audit, yaitu memperhatikan tata kelola perusahaannya.

2.2.3. Pergantian Kantor Akuntan Publik (Y)

Pergantian kantor akuntan publik adalah perpindahan KAP yang dilakukan oleh klien, yang merupakan suatu tindak pengambilan keputusan yang direncanakan oleh perusahaan *go public* atau *non-go public* untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka. Perpindahan KAP sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena klien melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain yang KAPnya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang dahulu, dan merger antar KAP (Abdul H., 2012).

Pergantian kantor akuntan publik dilakukan agar mencegah terjadinya hubungan yang lebih intim antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama. Hubungan tersebut dianggap sebagai suatu yang patut diwaspadai karena akan mengganggu independensi dari auditor. Regulasi pemerintah yang baru dalam PP No. 20/2015 justru menghilangkan peraturan *audit tenure* pada kantor akuntan publik. Hal itu berarti, setiap pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh klien, maka yang harus diperhatikan guna mencari tahu penyebab pergantian KAP tersebut adalah klien itu sendiri (Febrianto, 2014).

Ketika klien bekerjasama dengan KAP yang baru, akan terjadi ketidaksamaan informasi yang dimiliki antara KAP tersebut dengan kliennya. Tentunya KAP baru harus menyesuaikan diri dengan industri bisnis klien, dan klien juga tentunya akan mencari KAP yang berkualitas sehingga dapat memberikan opini audit yang berkualitas juga.

Oleh karena itu, ada dua kemungkinan yang terjadi saat klien memilih auditor yang baru. Pertama, klien memilih auditor karena auditor mungkin telah mendapatkan informasi yang cukup lengkap tentang klien. Hal itu bisa dipastikan karena auditor bisa saja menghubungi auditor klien sebelumnya untuk menanyakan hal-hal tentang kliennya. Kedua, klien dengan sengaja memilih auditor yang belum mengerti perusahaan klien agar mendapatkan opini yang diharapkan manajemen, hal itu didukung apabila auditor dan KAP itu memiliki masalah finansial.

Pergantian kantor akuntan publik juga dianggap sebagai sinyal negatif oleh investor dan pelaku pasar lainnya karena mereka percaya dengan adanya

pergantian tersebut, perusahaan akan menjadi lebih agresif dalam pelaporan keuangan mereka, yang berarti kredibilitas informasi keuangan tersebut menjadi berkurang. Saat melakukan pergantian kantor akuntan publik, akan ada dampak pula pada kinerja keuangan perusahaan. Pasar akan bereaksi negatif, seperti menekan harga saham perusahaan, atau memilih perusahaan jasa perbankan yang lain. Selain itu, akan ada biaya yang besar untuk melakukan pergantian kantor akuntan publik, seperti biaya negosiasi KAP dan biaya untuk membantu pengenalan auditor terhadap lingkungan bisnis perusahaan. Di dalam prakteknya, pergantian kantor akuntan publik dapat dilakukan dengan bentuk yang berbeda, yaitu mengganti ke KAP yang lebih besar atau ke KAP yang lebih kecil. Namun respon negatif akan diberikan pengguna laporan keuangan perusahaan apabila perusahaan beralih dari KAP yang besar ke KAPyang lebih kecil. Karena hal tersebut bisa dianggap seperti perusahaan melakukan *opinion shopping*, atau mungkin kinerja keuangan perusahaan yang buruk sehingga tak mampu membayar jasa KAP besar.

2.2.4. Opini Audit (X_1)

Audit atas laporan keuangan adalah kegiatan memperoleh dan mengevaluasi informasi dan bukti dari laporan keuangan perusahaan agar dapat memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bagi perusahaan yang terdaftar di BEI (*go public*), wajib menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk dipublikasikan kepada investor, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan.

Opini audit adalah laporan yang diberikan oleh auditor suatu perusahaan yang menyatakan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan temuan audit dan standar yang berlaku juga disertai dengan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya.

Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri atas 5 jenis yakni:

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

   Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat audit sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tersebut tidak menemukan adanya kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau juga tidak terdapat penyimpangan dari adanya prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan tersebut digunakan jika terdapat keadaan berikut:

   a. Bukti audit yang dibutuhkan sudah terkumpul dengan secara mencukupi dan juga auditor sudah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan tersebut sudah ditaati.
   b. Standar umum sudah diikuti sepenuhnya didalam perikatan kerja.
   c. Laporan keuangan yang di audit tersebut disajikan sesuai dengan adanya prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan yang sebelumnya.
   d. Demikian juga pada penjelasan yang mencukupi sudah disertakan pada catatan kaki serta bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
   e. Tidak terdapat adanya ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) tentang perkembangan di masa mendatang yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya atau juga dipecahkan dengan secara memuaskan.

2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

   Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar. Keadaan tertentu bisa terjadi apabila:

   a. Pendapat auditor sebagian didasarkan dari pendapat auditor independen lain.
   b. Disebabkan karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan tersebut dibuat menyimpang dari SAK.
   c. Laporan tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa atau kejadian masa yang akan datang hasilnya belum bisa diperkirakan ditanggal laporan audit.
   d. Terdapat keraguan yang besar terhadap suatu kemampuan satuan usaha didalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

e. Diantara 2 periode akuntansi terdapat suatu perubahan yang material didalam penerapan prinsip akuntansi.
f. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tetapi tidak disajikan.

3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan dikatakan wajar didalam hal yang material, namun tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dilakukan pengecualian. Dari pengecualian tersebutlah yang bisa mungkin terjadi, apabila:

a. Buktinya kurang cukup
b. Adanya pembatasan dalam ruang lingkup
c. Terdapat suatu penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum (SAK).

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat tersebut diberikan apabila:

- Tidak adanya bukti kompeten yang cukup dan jelas atau juga adanya pembatasan dalam lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi suatu laporan keuangan dengan secara keseluruhan.
- Auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut berisikan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum yang berdampak material namun tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan dengan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut bisa berupa suatu pengungkapan yang tidak memadai, ataupun perubahan didalam prinsip akuntansi.

4) Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan secara keseluruhan itu bisa terjadi jika auditor harus memberi tambahan suatu paragraf untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan keuangan, yang disertai dengan dampak dari akibat adanya ketidakwajaran tersebut, pada suatu laporan auditnya.

5) Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan suatu pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Pembuatan laporannya auditor tersebut harus memberi penjelasan mengenai pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tersebut tidak memberi pendapat.

2.2.4.1. Opini Audit dengan Paragraf Penjelas terkait *Going Concern*

Selain menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan, auditor juga bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha (*going concern*) oleh manejemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian material tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (IAPI, 2016). Ketika investor akan melakukan investasi pada entitas tertentu, maka perlu untuk mengetahui kondisi keuangan terutama yang menyangkut kelangsungan hidup (*going concern*) suatu entitas. Menurut Standar Audit (SA) 570 dalam IAPI (2016), berdasarkan asumsi kelangsungan usaha (*going concern*), suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan apabila dapat diprediksi. Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan operasinya dalam jangka waktu kedepan (Muhamadiyah, 2013). Auditor harus dapat bertanggung jawab atas opini audit *going concern* yang dikeluarkannya, karena akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporannya seperti investor, kreditor.

2.2.5. Kinerja Keuangan Perusahaan (X_2)

Perusahaan dalam melakukan kegiatannya tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai guna memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan adalah prestasi manajemen, karena kinerja perusahaan dapat dinilai dengan melihat prestasi manajemennya.

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan,

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang juga mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Pengertian lain dari kinerja keuangan diberikan oleh IAI (2019) yang mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Penilaian dari kinerja keuangan perusahaan dapat diintepretasikan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut dengan melakukan perhitungan rasio keuangan. Menurut Subramanyam (2014:35), analisis rasio dapat menemukan hubungan yang penting dan dasar perbandingannya dalam mengungkapkan kondisi dan trend yang sulit untuk dideteksi hanya dengan inspeksi tiap komponen yang membentuk rasio itu.

Dari pengertian di atas, maka rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan di tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk dapat menginteptetasikan hasil perhitungan rasio keuangan, maka dibutuhkan suatu metode pembandingnya. Ada dua metode pembandingan rasio keuangan perusahaan menurut Syamsuddin (2010),yaitu:

1. *Time series analysis*. Metode ini dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya.
2. *Cross-sectional approach*. Metode ini dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan.

Namun tidak semua rasio dapat digunakan dengan tepat pada setiap analisis yang dilakukan. Syamsuddin (2010) menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis:

1. Pembandingan yang dilakukan haruslah dari perusahaan yang sejenis dan pada saat yang sama.
2. Sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai keseluruhan operasi yang telah dilaksanakan.
3. Perhitungan rasio finansial sebaiknya didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.

4. Perlu diperhatikan juga bahwa pelaporan atau standar akuntansi yang digunakan haruslah sama.

Ada berbagai jenis rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan, namun pada perusahaan perbankan ada sedikit perbedaan dengan pengukuran kinerja suatu perusahaan secara umum. Beberapa rasio keuangan bank yang sering digunakan adalah:

1) Rasio Likuiditas. Pada umumnya rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui tingkat kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan untuk menilai kinerja pengelolaan aset dan kewajiban likuidnya. Rasio yang tergabung dalam rasio likuiditas adalah:
   a. *Banking ratio,*
   b. *asset to loan ratio,*
   c. *quick* ratio, dan
   d. *loans to deposit ratio.*
2) Rasio Solvabilitas. Rasio solvabilitas umumnya digunakan untuk mengetahui tingkat *leverage* (penggunaan hutang) yang digunakan untuk mendanai asetnya, juga mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio yang tergabung dalam rasio solvabilitas adalah:
   a. *Primary ratio*, dan
   b. *Capital adequacy ratio* (CAR).
3) Rasio Profitabilitas. Rasio profitabilitas pada umumnya digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Rasio yang tergabung dalam rasio profitabilitas adalah:
   a. *Gross profit margin,*
   b. *Net profit margin,*
   c. *Earning power of total investment* (ROA), dan
   d. *Return on equity* (ROE).

4) Rasio Efisiensi. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam menggunakan semua faktor produksinya secara tepat dan berhasil. Rasio yang tergabung dalam rasio efisiensi adalah:
   a. *Leverage multipler ratio* (LMR),
   b. *Asset utillization ratio* (AUR), dan
   c. *Operating ratio.*

Dari berbagai macam rasio keuangan di atas, yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah dengan menggunakan rasio solvabilitas dengan fokus pada rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR dipilih karena dalam perusahaan perbankan, modal merupakan faktor utama untuk dapat mengembangkan pertumbuhan usahanya.

CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal untuk menampung risiko bank menghadapi kerugian. Semakin besar nilai CAR, maka semakin baik kemampuan bank dalam menanggung setiap risiko kredit/aset dan mampu membiayai kegiatan operasional. Dilihat dari teori tersebut, maka CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{Tier\ 1\ Capital + Tier\ 2\ Capital}{RiskWeightAssets}$$

Tier 1 capital terdiri dari *paid up capital* dan *disclosed reserves*. *Tier 2 capital* terdiri dari *revaluation reserves*, *general loss reserves*, *subordinated loan*, dan *undisclosed reserves*. *Risk weighted assets* menunjukkan risiko kredit yang diberikan bank dan dibobotkan masing-masing menurut peraturan BI. CAR yang sehat bagi perusahaan perbankan adalah ketika CARnya di atas delapan persen.

2.2.6. Pergantian Manajemen (X_3)

Dalam sebuah perusahaan, peran manajemen sangatlah penting karena kelangsungan operasi perusahaan dan aktivitas perusahaan secara profesional dalam menghasilkan keuntungan keuangan bergantung dari peran mereka. Itu berarti pergantian auditor juga dilakukan oleh manajemen apabila manajemen merasa auditor mereka tidak memiliki kompetensi, atau bahkan ketika auditor tidak mau bekerjasama melakukan kecurangan bersama manajemen. Namun tetap saja manajemen pun dapat diganti dengan tim yang baru.

Menurut Ismail *et al*. (2015), berubahnya struktur manajemen merupakan hal yang biasa terjadi, terutama untuk perusahaan-perusahaan *go public*. Pergantian manajemen itu bisa seperti perubahan dewan direksi, *financial controller* dan direktur manajemen, serta perubahan pada struktur komite audit.

Pengukuran variabel ini menggunakan variabel *dummy*. Dimana perusahaan yang melakukan pergantian manajemen diberi angka 1 (satu), dan perusahaan yang tidak melakukan pergantian manajemen diberi angka 0 (nol).

2.2.7. Tata Kelola Perusahaan (M)

Menurut Susanto A.B. (2014) hakikat dari tata kelola perusahaan adalah proses dan struktur dari berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja perusahaan sesuai dengan yang diinginkan *stakeholders*. Hal ini dimaksudkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik itu dibutuhkan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat yakin bahwa kinerja yang baik dan profesionalisme dari perusahaan akan membawa keuntungan untuk mereka.

Samanta (2010) dalam Johari (2015) mengatakan bahwa dalam tingkat yang paling dasar, tata kelola perusahaan digambarkan sebagai suatu proses perusahaan yang berusaha untuk meminimalisir biaya transaksi dan biaya agensi terkait dengan bisnis yang dijalankan perusahaan. Itu juga menggambarkan bahwa tata kelola perusahaan mengarahkan perhatiannya pada peningkatan kinerja korporasi.

Tata kelola perusahaan adalah upaya untuk memotivasi manajemen untuk meningkatkan keberhasilan dan mengendalikan perilaku manajemen agar tetap mengindahkan kepentingan *stakeholders* (Susanto A.B., 2014). Hal itu penting karena keselarasan antara manajemen dengan perusahaan akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* menyatakan lima prinsip tentang tata kelola perusahaan yang harus dijalankan oleh perusahaan, yaitu:

1) Transparansi (*Transparency*)

   Perusahaan harus terbuka dalam mengambil setiap keputusan dan terbuka dalam memberikan informasi kepada pemegang saham, kreditor, dan

pemangku kepentingan lainnya agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi dianggap penting dan relevan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada setiap karyawan dan menegaskan fungsi dasar setiap bagian. Akuntabilitas juga menghindari adanya tumpang tindih tanggung jawab profesi.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan memiliki pertanggungjawaban terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, juga kepada pemangku kepentingan (pemegang saham), lingkungan (AMDAL), masyarakat (norma dan CSR), dan pihak lain yang terlibat dalam proses operasional perusahaan. Hal ini penting agar perusahaan dapat terus berkembang dan dikenal sebagai perusahaan yang baik.

4) Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa campur tangan dari pihak lain yang mempunyai kepentingan pribadi atau golongannya. Otonomi dalam pengambilan keputusan harus dilakukan oleh perusahaan demi kepentingan perusahaan agar semakin objektif dan keputusan yang diambil semakin tepat untuk keberlangsungan hidup perusahaan.

5) Keadilan (*Fairness*)

Perlakuan yang adil harus diberikan kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku agar tidak terjadi konflik kecemburuan terhadap sesama pemangku kepentingan. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat semua pekerjaan berjalan seperti yang diharapkan dan melindungi kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.

Tata kelola perusahaan diciptakan karena perusahaan wajib untuk memastikan kepada pihak investor bahwa dana yang akan mereka tanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan harus

dipahami lebih dalam agar perusahaan dapat memahami kontribusi nyata dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam perusahaannya.

Mekanisme tata kelola perusahaan adalah suatu aturan, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap keputusan tersebut dan diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem tata kelola dalam suatu perusahaan.

Wulandari (2018) menyatakan bahwa indikator dalam mekanisme tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik di Indonesia. Dan proksi tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit dan komisaris independen.

2.2.7.1. Komite Audit (M_1)

Menurut Arens *et al*., (2010) komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi yang salah satu tanggung jawabnya adalah membantu auditor mempertahankan independensinya. Komite audit juga bertugas untuk memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik. Dan umumnya, komite audit beranggotakan tiga sampai lima direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

Dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan, komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris dalam memberikan pandangannya mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan keuangan, serta melakukan pengawasan atas fungsi pengendalian internal dan eksternal perusahaan.

Keberhasilan suatu komite audit dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Debby (2010) dalam Nuratama (2011) menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Kewenangan formal dan tertulis,
2. Kerjasama manajemen,dan
3. Kualitas/kompetensi anggota komite audit.

Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan komite audit dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan pertemuan formal antar anggota komite, dewan

komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal. Komite audit yang aktif melakukan pertemuan akan lebih mungkin untuk mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan pergantian KAP. Abbot *et al.*, (2010) dalam Johari (2015) juga menyampaikan bahwa pertemuan komite audit yang sering akan memunculkan komitmen audit yang lebih kuat dan akhirnya akan mengurangi kemungkinan penyajian kembali terhadap laporan keuangan.

2.2.7.2. Komisaris Independen (M_2)

Komisaris yang independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan bagian dari manajemen, pemegang saham pengendali, atau memiliki hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk berlaku secara independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2010). Adanya komisaris independen akan membuat pengawasan terhadap manajemen semakin baik sehingga mengurangi resiko terjadinya kecurangan dan terciptalah tata kelola yang baik.

Istilah dan keberadaan komisaris independen baru muncul setelah terbitnya peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2011 yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.

Dengan keberadaan komisaris independen, integritas laporan keuangan yang dihasilkan manajemen akan terpengaruh. Amri (2011) seorang pakar *Good Corporate Governance* pun menekankan bahwa komisaris independen memiliki tugas untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lain, terungkapnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku, dan akuntabilitas organ perseroan.

Komisaris independen dapat berfungsi sebagai mediator apabila terjadi konflik diantara manajemen dan mengawasi kebijakan serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dari fungsi-fungsi komisaris independen yang telah dijelaskan, maka terlihat adanya pengaruh jumlah komisaris independen terhadap keputusan perusahaan melakukan pergantian KAP.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini opini audit; kinerja keuangan perusahaan; dan pergantian manajemen adalah sebagai variabel bebas, pergantian KAP adalah variabel terikat, komite audit dan komisaris independent adalah variabel moderasi. Maka hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:
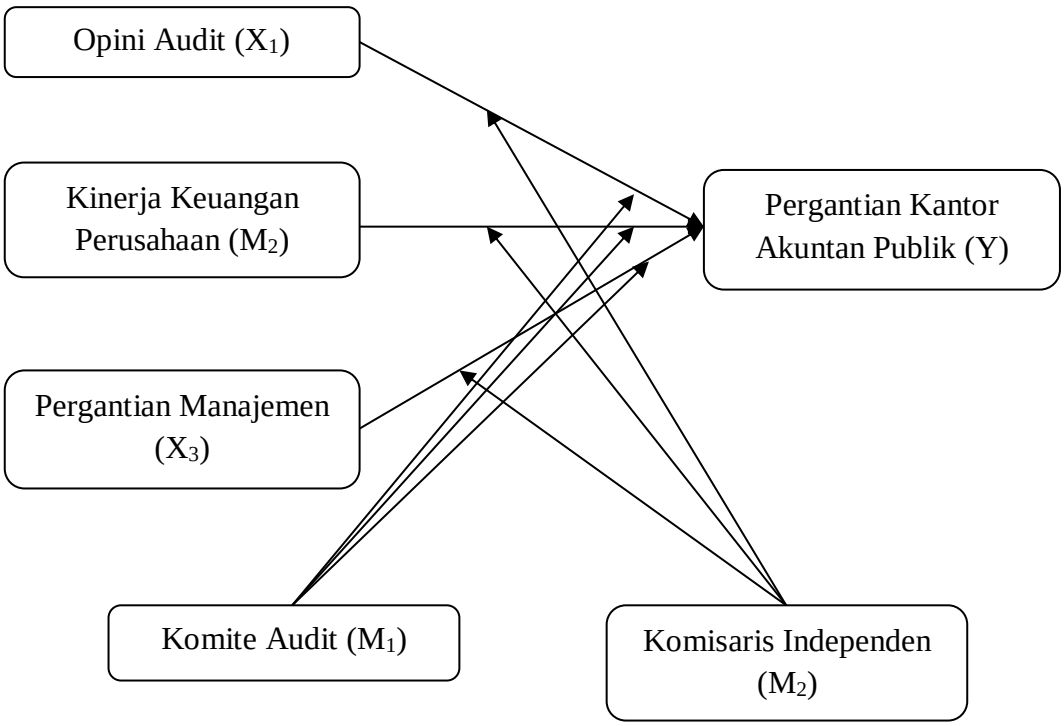
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian